

PENDAHULUAN

BAB I

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini media digital memiliki pengaruh sangat besar sebagai penunjang dalam kegiatan politik dan berperan penting untuk menentukan sikap partisipasi politik masyarakat, pers dalam hal ini harus bersifat bebas, netral, dan bertanggung jawab, karena pers merupakan media yang sangat penting dalam menunjang keterbukaan demokrasi, ciri Negara demokratis menurut Agung Suhariyanto (2016, hlm. 124) adalah kebebasan menyampaikan aspirasi, kebebasan pers dalam surat kabar baik melalui media cetak, media masa, maupun media digital, memiliki kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi dan kebebasan untuk menganut agama yang dipercayai oleh masing-masing individu.

Hakikatnya bahwa sebuah perubahan kekuasaan berada ditangan rakyat, dan rakyat itu sendiri yang menjadi poros dan pemeran utamanya, dimana proses demokrasi yang sehat dalam menentukan haknya untuk memilih, akan menemukan hasil ahir yang baik dalam sebuah proses pemilihan, oleh sebab itu dalam rangka melahirkan seorang pemimpin yang lebih baik dari periode sebelumnya, maka rakyat harus melek politik, terutama pada pemilihan presiden tahun 2019. Dalam hal ini Perjalanan demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut terutama mengenai perilaku para pemeran politik dan para elit didalamnya, kita bisa melihat dari sikap cara berdemokrasi mereka yang masih arogan dan haus akan kekuasaan, serta lemahnya kultur kewarganegaraan yang berada pada diri setiap politisi yang ada, oleh sebab itu demokrasi yang merupakan sebuah sistem politik dimana seharusnya masyarakat punya hak prioritas dalam melaksanakan pemerintahan.

Selain itu ada juga hal yang harus dipertimbangan tentang sistem demokrasi kita saat ini, pasalnya pemberian pemahaman terhadap sistem politik yang kita lakukan terhadap masyarakat dianggap masih kurang, dan perlunya pembinaan terhadap masyarakat supaya mengetahui sedikitnya tentang politik kita. jika

Enjang Abdul Latif, 2020

PERAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA LITERASI POLITIK GENERASI MILENIAL PADA PROSES PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019 (Suatu Studi Kasus di Kabupaten Garut)

Melihat kepada pendapat David Easton (dalam Bedi Iriawan, 2013, hlm.24) ia menyatakan bahwa sistem politik terdiri dari sejumlah rangkaian Lembaga negara berikut aktivitasnya yang terdiri dari mengubah tuntutan (*demands*), dukungan (*support*), sumber (*resources*) menjadi suatu kebijakan yang sifatnya memaksa atau *otoritatif* secara sah dan mengikat bagi masyarakat.

Meskipun begitu kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada, sehingga menjadi sebuah pembaharuan dan perbaikan nilai yang sebelumnya dianggap keliru dan kurang tepat. Pemilu serentak tahun 2019 memiliki berbagai catatan yang harus kita perbaiki Bersama diantaranya ialah adanya sebuah kecendrungan masyarakat yang terpecah belah, dikarenakan pilpres 2019, dan salah satunya adalah adanya sebuah politik identitas, oleh sebab itu tidak bisa dipungkiri bahwa *relasi* antara agama dengan negara kaitannya sangat erat dalam sebuah pemerintahan, melihat dari kaca mata sejarah bahwa partai islam sejak dulu sudah mengikuti peran dalam panggung politik, bahkan sampai saat ini, seperti partai PKB PAN PKS, PPP dll. Dalam hal ini Agus Saputro (2018, hlm.115) berpendapat bahwa politik identitas secara konsisten mempunyai pengaruh yang signifikan pada pemilu, khususnya pada proses pilpres 2019. Akan tetapi yang terjadi sekarang bukan identitas politik dalam hal perbedaan agama, akan tetapi lebih kepada loyalitas partai politik terhadap organisasi masyarakat yang berada di dalamnya.

Yang menjadi sorotan pada pilpres kali ini adalah peran media social yang sangat berpengaruh dalam proses penyelenggaraan pesta demokrasi tahun 2019. media social selain sebagai sebuah sarana untuk *meloby* masyarakat dengan kampanyenya serta jargon-jargon parpolnya, pada tahun 2019 media dijadikan sebagai sebuah fasilitas untuk menjatuhkan lawan politik dengan cara membuat *framing* di masyarakat, mislannya fenomena #2019 ganti presiden yang berada di kubu (oposisi) Prabowo dan Gerakan # 2019 tetap Jokowi menjadi perbincangan yang hangat di media social selama masa persiapan sampai dengan penyelenggaraan pesta demokrasi itu berlangsung. Menurut Sherly Nelsya Fitri (2018, hlm.285) kampanye yang dilakukan dengan menggunakan framing sangat berpengaruh kuat dalam mempromosikan calonnya kepada masyarakat karena nantinya, hal tersebut akan mengarah kepada dorongan untuk memperkuat pada

tujuan tertentu dari parpol yang menjadi kontestan, khususnya dalam kegiatan pada proses pemilihan, seperti pemungutan suara, pengumpulan dana, meyakinkan pemilih, dan lain sebagainya.

Keterlibatan generasi milenial pada pemilihan presiden kali ini memiliki pengaruh sangat besar terhadap kemenangan salah satu paslon tentunya, dan peroses memahami demokrasi dan politik sangat jauh berbeda disetiap tahunnya, penggunaan media social merupakan sebuah kebutuhan primer yang tidak mungkin bisa dihindari lagi untuk tahun politik serta pesta demokrasi saat ini maupaun yang akan datang, terlebih lagi berbagai cara dilakukan pemilik media yang tidak netral untuk saling menjatuhkan lawan politiknnya, akibatnnya kepercayaan masyarakat terus berkurang terutama terhadap pemerintah yang menguasai media saat ini. Padahal sejatinnnya baik media massa maupun digital (media social) merupakan sarana yang paling instan dalam mengambil perhatian masyarakat.

Pada era digital saat ini erupakan zaman atau fase yang semuanya serba memudahkan dan instan, karena penggunaan terhadap media digital bukan hanya kaum milenial saja yang yang dapat mengaksesnya, akan tetapi semua kalangan tanpa kelas dan batas usia sudah memahami terehadap penggunaanya, serta pada teknologi tersebut *gadget (smart phone)* dalam hal ini era digital memiliki pengaruh terhadap perubahan terhadap komunikasi politik.

Menurut Vowe dan Henn (dalam Anwar Abugaza, 2014, hlm.1). teknologi membawa 6 perubahan diantaranya: *pertama* perubahan ruang public dimana pada era ini untuk melakukan sebuah komunikasi dan menerima informasi tidak memiliki Batasan yang setajam pada zaman dulu antara (politik public, pemerintah, dan pribadi), *kedua* perubahan dalam dimensi sosial saat ini, dimana warga/masyarakat dijadikan sebagai penerima dan perantara dalam sebuah organisasi politik secara langsung melalui media sosial, *ketiga* topik komunikasi politik ruang lingkupnnya sangat luas sehingga semua orang dapat memperoleh pesan politik melalui humor, komedi, atau peristiwa sehari-hari, *keempat* khalayak dapat memilih kriteria politik yang sesuai dengan pilihan politiknnya disebabkan banyaknya saluran politik yang asinkroniasasi dengan politik itu sendiri. *Kelima* media sosial menempatkan aktor paling penting dalam berkomunikasi politik,

keenam jaringan Komputer merupakan sebuah media terdepan dalam melaksanakan perpolitikan yang berada di masyarakat.

Dalam prakteknya komunikasi politik Menurut Budiyo (2016, hlm.48) dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa aksi politik yang nyata, dimana posisi komunikasi politik saat ini merupakan sebuah *neologisme* “ilmu yang sebenarnya tidak lebih hanya sebuah istilah belaka, dan ini kaitannya sangat kental dengan kegiatan kehidupan masyarakat yang ada setiap hari.

Selain itu pertumbuhan media sosial sudah menjadi sebuah tren penting sebagai kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari, dan ini dikemas dalam berbagai bentuk yang sangat beragam, sehingga memudahkan kita untuk menggunakan media sosial tersebut yang terdiri dalam bentuk aplikasi yang beragam yang bisa dimanfaatkan dalam melaksanakan sebuah kegiatan komunikasi dengan orang lain secara virtual. Atiqah Nur Alami, (2013, hlm.86)) berpendapat bahwa perkembangan terhadap aplikasi seperti *twitter*, *facebook*, *instagram* dan lain sebagainya, ataupun bisa dalam bentuk *microblogging* atau *weblog* bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik, sehingga pada kesempatan tersebut para politisi memperoleh keuntungan yang signifikan untuk meningkatkan interaksi dan *elektabilitas* partai politiknya, baik dengan konstituen maupun dengan masyarakat secara umum.

Oleh sebab rakyat harus bisa menggunakan sistem politik yang baik sebagai sebuah hal yang bisa mengatur masyarakat dan bisa berkontribusi di dalamnya, Adelia Fitri (2018, hlm.114) mengemukakan bahwa Sistem politik yang demokratis yaitu sistem yang terpusat ditangan rakyat sehingga rakyat bisa kita asumsikan sebagai sebuah golongan yang paling kuat dalam menentukan demokrasi. Beda halnya jika pemerintahan tersebut lebih kuat dari rakyat maka bisa disebut dengan otoriter, oleh sebab itu demokrasi yang kuat berasal dari sebuah keamanan sistem politik yang *balance* antara pemerintah sebagai pihak penguasa dan masyarakat yang menjalankan demokrasi tersebut.

Pada saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran media sosial yang setiap hari kita pakai dan kita gunakan ikut andil dalam menentukan sebuah kebijakan yang ada di negeri ini, pengaruhnya terhadap iklim dan tren media sosial ahir-ahir ini begitu *massif* dan tentu menarik untuk dilakukan sebuah kajian

mendalam terhadap peran apa saja yang dipengaruhi oleh media sosial sebagai alat dalam berpolitik, perlu diingat, dalam hal politik begitu banyak kekuatan besar yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingannya yang secara khusus memainkan peran dalam media sosial untuk menarik perhatian masyarakat. Ayub Dwi Anggoro (2014, hlm.27) berpendapat bahwa Era kecanggihan dalam berpolitik melahirkan sebuah dinamika sosial, misalnya dalam persaingan industri, penggunaan media saat ini bukan hanya dalam ranah ekonomi dan bisnis saja akan tetapi dalam ranah politik dan demokrasi juga ikut terlibat didalamnya, karena media sebagai sebuah factor untuk menentukan siapa pemenang dan siapa yang kalah nantinya.

Selain media masa, media digital khususnya media sosial juga mengalami perkembangan yang signifikan yang perlu dikaji, Istilah *facebooker*, *twitterland*, *IG-ers* merupakan sebuah ungkapan yang mungkin populer dikalangan masyarakat saat ini dan ini disematkan kepada seseorang yang kerap sering aktif dalam penggunaan media sosial, *face book*, *twitter*, dan *Instagram*.

Media sosial menurut Yudha Pradana (2017, hlm.139) pada saat ini menjadi sebuah fenomena yang semakin menggelobal dan semakin populer di masyarakat, dimana keberadaannya semakin tidak mungkin untuk dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari, dan setiap tahunnya pengguna media digital mengalami peningkatan yang signifikan, khususnya di Indonesia. Seperti yang di kutip dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Ia menyatakan bahwa statistic penggunaan internet di Indonesia pada tahun 2016 adalah sekitar 132,7 juta jiwa hal ini mengindikasikan bahwa pengguna internet mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2018 kemarin terhitung pada bulan maret misalnya dilihat dalam compass menurut data dari APJII pengguna internet mengalami kenaikan sampai dengan 10,12 %, data ini di ambil hingga April 2019, sedangkan menurut Henri dari total 264 juta jiwa ada sekitar 171 juta jiwa pada masyarakat Indonesia sebagai pengguna internet atau sekitar 64,8 % sudah terhubung ke internet. Keterbukaan mengenai informasi yang dapat diakses dimanapun, sejalan dengan kebutuhan manusia dari waktu ke waktu, sebelum era internet manusia hidup dengan saling berinteraksi secara langsung satu sama lain membicarakan semua hal

dalam sebuah komunitas yang berada di masyarakat, entah dalam sebuah komunitas yang paling terkecil yaitu dalam ruang lingkup keluarga maupun dengan komunitas terbesar yang berada pada masyarakat secara umum. Ketika mengenal media sosial kadang seseorang yang tadinya sering berdiskusi dan membicarakan sebuah hal dengan saling bertatap muka, kini kita dimanjakan dengan fasilitas yang berada dalam internet tersebut, dalam hal ini ada sebuah penurunan nilai dalam interaksi sosial yang secara etika telah mulai memudar dan menurun dari masyarakat kita saat ini.

Lantas nilai seperti apa yang mengalami penurunan dalam masyarakat, sehingga adanya kesenjangan sosial tersebut, yang kemudian secara perlahan menjadi hilang yang disebabkan oleh perkembangan teknologi, misalnya dalam teori *fungsiionalisme* menurut Ramdani Wahyu (2013, hlm.29) dalam hal ini, kaidah mengenai nilai dan keyakinan berupa sebuah tindakan yang memiliki fungsi di masyarakat sebagai keseimbangan dalam sistem sosial yang berupa manifes yang diharapkan pada kaidah, nilai dan keyakinan tersebut supaya tidak memudar dalam kehidupan masyarakat, akibatnya jika hal tersebut sudah tidak memiliki fungsi maka akan terjadinya sebuah ketidak seimbangan yang berada dalam masyarakat.

Teknologi, politik, dan proses demokrasi saat ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain sebab semua yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari 3 aspek tersebut, namun yang perlu diawatirkan pada generasi milenial saat ini adalah adanya sebuah permasalahan mengenai keakraban kaum muda terhadap politik, menurut Anisyah Alfaqir (2018, hlm.28) ia melakukan wawancaranya dengan salah seorang pria yang usianya 25 tahun ketika ia diwawancara mengenai politik dan demokrasi ia mengatakan bahwa mereka tidak tertarik sama sekali dengan hal yang berbau politik ahir-ahir ini, mengetahui tentang politikpun hanya sekilas saja dan jauh keinginan mereka untuk bergabung dengan salah satu partai politik, terlebih lagi ada temannya yang menambahkan bahwa politik itu kotor udah tau kotor ngapain ikut nyemplung liat aja dari atas jadi yang nontonin aja, ujarannya dalam sebuah wawancara.

Artinya bahwa ada sebuah nilai yang berubah dari politik tersebut yang disebabkan orang yang memiliki peran dalamnya banyak tidak baik dalam menggunakan cara-cara berpolitiknya, yang secara terus menerus dilakukan.

Sehingga mengubah pandangan masyarakat yang tadinya politik itu baik berubah menjadi sesuatu yang kotor dan menjijikan. Jika kita melihat kata politik menurut Meriam Budiarjo (2008, hlm.13) memiliki makna “yaitu sebuah usaha untuk menggapai kehidupan yang lebih baik, Plato dan Aristoteles menyebutnya sebagai *endem onia* atau *the good life*”.

Politik sebagai proses untuk menentukan kehidupan yang lebih baik kini berubah menjadi sesuatu yang kurang baik dan kurang diminati oleh masyarakat, karena di dalamnya dijadikan alat untuk berebut kekuasaan dengan menghalalkan berbagai cara, agar setiap orang mampu menjadi pemenang untuk berkuasa, serta banyak tipu muslihat yang digunakan untuk menjatuhkan lawan politiknya, dan mereka hanya menganggap benar terhadap politik dari sudut pandang mereka dan kelompok mereka saja, tanpa memperdulikan sebuah nilai kebenaran dari orang lain dan masyarakat yang berada disekitarnya. hal ini mengingatkan terhadap peribahasa “*homo homini lupus*” manusia merupakan serigala bagi manusia yang lainnya, dan dunia menurut agustinus dalam (Kusnadi dan Bintan, 2015, hlm.49) jika sang penguasa tidak bisa berlaku adil maka negara tersebut disebut dengan negara iblis *civitas terrena/civitas diaboli* yang di dalamnya tidak mendapati keadilan sedikitpun.

Selain ketidakadilan yang terus ada dalam dunia pemerintahan, politik saat ini yang terus mengalami perkembangan terutama mengenai komunikasi politik yang kian marak dan berkembang yang mejadi pemicu sebuah permasalahan, dimana hal ini telah merambah kepada kehidupan umat manusia yang kemudian menjadi sebuah kebutuhan primer, dan salah satu perkembangannya adalah perkembangan terhadap komunikasi media baru *new media* yang kemudian melahirkan media sosial *social media*. Menurut Stietglitz dan Xuan (dalam Faridhian Anshari, 2013, hlm. 92) Pengaruh media sosial terhadap politik sudah menjadi sebuah kemajuan tersendiri bagi sebuah negara, Amerika misalnya yang merupakan negara maju, dalam sebuah study yang dilakukan ia menyatakan bahwa media sosial merupakan alat kampanye yang lebih efektif, sebelum era media sosial negeri paman sam sudah memanfaatkan internet sebagai alat untuk berkampanye.

Yang sangat disayangkan jika pemilihan umum dalam media dijadikan sebagai alat untuk menyebarkan kebencian terhadap setiap masyarakat, hal ini

disebabkan terlalu bebasnya media dijadikan sebagai alat demokrasi yang bisa dibilang sudah kebablasan. Misalnya dalam demokrasi tahun ini banyak meme yang menjadi ciri khas dari pada tahun-tahun politik sebelumnya dari mulai kata *cebong* dan *kampret* hingga # 2019 ganti presiden dan # Jikowi dua periode menjadi sebuah kekhasan tersendiri yang mungkin masyarakat akan mengingatnya pada tahun politik selanjutnya, hal ini merupakan sebuah masalah jika kita tidak bisa mencermati secara bijak dan tidak bisa memfilter kata-kata yang menjadi meme tersebut, karena terlepas dari itu masyarakat mempunyai pandangan politiknya sendiri-sendiri baik yang memilih terhadap bapak Jokowi maupun pemilih terhadap bapak Prabowo. Oleh sebab itu jargon atau meme tersebut merupakan sebuah proses penggiringan opini di masyarakat yang setidaknya mengingatkan kita terhadap politik media sosial yang memiliki pengaruh yang signifikan.

Selain mengenai permasalahan yang terjadi dalam media sosial, politik identitas juga sangat mewarnai dalam pesta demokrasi kita saat ini, pasalnya umat islam dan agama lainnya terbagi menjadi beberapa kelompok, ikut serta politisasi agama bisa menentukan pilihan seseorang dalam melaksanakan demokrasi.

Dalam teori *revival realitions politicacion* menurut Ates dan Altinordu (2010, hlm.5). ia menyatakan “*according to this theory, major religious revivals increase the visibility, social influence, and autonomy of religion*”.

Bahwa kebangkitan agama akan meningkatkan visibilitas dan pengaruh sosial, yang imbasnya jika wacana budaya bercokol terhadap keagamaan akan melahirkan actor kuat negara sosial yang dianggap sebuah ancaman bagi kepentingan para penguasa dan kelompok tertentu.

Selain politik identitas *framing* menurut Erond Lito Damanik (2018, hlm.1) ia menyatakan bahwa yang dibuat oleh para politisi juga berpengaruh dalam kampanye politikk dimana *has tag*/tagar # menjadi ciri has dalam pilpres 2019, kata hastag merupakan sebuah kata yang diadaptasi dari intertektualitas, yang berfungsi sebagai tanda baca atau enkripsi, secara garis besarnya bahwa hastag (#) 2019 ganti presiden merupakan kalimat yang secara tidak langsung menunjukan kepada arena politik atau keadaan politik dan menurut Pinker disebut dengan *indirect speech*. Dimana tagar ini merupakan sebuah *antitesis* yang ditujukan terhadap kampanye dari pendukung Jokowi dodo.

Media sosial sebagai saran kampanye dalam pertarungan pemilihan presiden periode kedua secara *head to head* menurut Fredy Kurniawan (2018, hlm 32) ia berpendapat bawasanya pilpres saat ini menunjukkan suasana yang semakin memanas, dimana meme-meme yang beredar di media sosial belakangan ini seperti tagar #2019 ganti presiden atau #jokowi 2 periode merupakan sebuah trending topik. *Snapshot* yang terkumpul dari tweet reach menunjukkan tagar untuk #jokowi dua periode tercatat 94.829 pengguna sampai dengan 151.403 yang terjangkau (*estimated reach*). Data yang diambil per 25 juli 2018. Sedangkan untuk hastag #2019 ganti presiden hanya mendapatkan jangkauan 76.440 namun eskposurnya mencapai 157.718 yang diambil pada tanggal yang sama yakni pada tanggal 25 juli 2018 s/d pukul 19.30.

Meme tersebut sebagai sebuah jargon untuk menarik hati rakyat untuk pemilihan memang sangat diperlukan, karena masyarakat Indonesia saat ini dapat mengakses media setiap saat hususnya media sosial, kampanye dalam bentuk jargon dinilai lebih efektif untuk bersaing dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden, tujuan kampanye sendiri adalah sebagai pengarah yang memperkuat dalam memberikan motivasi untuk memilih secara terus menerus, diamana hal ini menurut Rosadi Ruslan (dalam Sherly Nelsa Fitri, 2018, hlm. 285) bahwa tujuan kampanye merupakan sebuah tehnik komunikasi yang sangat terencana dan terkonsep demi terlaksananya sebuah tujuan dalam mencapai publisitas yang positif, dimana dalam kampanye tersebut memiliki banyak warna yang seperti kampanye positif, negative dan abu-abu.

Media massa dan media digital terutama media sosial saat ini sudah memiliki banyak fungsi selain sebagai sebuah alat komunikasi perorangan atau kelompok tertentu, media masa dan media sosial dijadikan sebagi bahan promosi politik untuk meyakinkan masyarakat, sepintas hal ini sama dengan promosi barang dimana hal tersebut menurut Ali Mustofa (2013, hlm. 63) memiliki unsur produk (berbagai program yang ditawarkan), *price* (upaya dan akses), *promotion* (iklan dan publisitas) serta *place* atau lokasi. Itu tidak jauh berbeda dengan kampanye politik, sama dengan mempromosikan sebuah barang agar dapat dibeli oleh msasyarakat dengan kepercayaannya, pendekatan *persuasive* dilakukan untuk pemasaran komersial (para pemegang saham / *share holder objective*) sedangkan

tujuan sosialnya adalah untuk mempromosikan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

Isu-isu yang berkembang dalam pesta demokrasi tahun 2019 menjadi sebuah warna tersendiri yang disebabkan oleh pengaruh media (massa dan digital) yang berdampak terhadap adanya gejolak dan *gap* yang terjadi dimasyarakat, dalam hal ini potensi terjadinya politik identitas dan isu-isu yang buruk terkait pemilu di tahun 2019 akan semakin memanas, dimana isu merupakan sebuah peristiwa yang muncul kepermukaan diakibatkan suatu kondisi tertentu terutama menjelang pemilu serentak.

Gap yang terjadi terutama mengenai informasi yang didapat oleh setiap masyarakat menjadi masalah penting yang perlu dikaji saat ini, terutama media sosial sebagai salah satu alat dalam komunikasi politik dan demokrasi pada pemilu 2019, menurut Pernita Hustin (2019, hlm. 18) pada tahun ini generasi milenial yang merupakan pengguna terbanyak berdasarkan usia yaitu dari umur 15-hingga umur 19 tahun berada di urutan pertama, sedangkan dalam urutan kedua yaitu dari umur 20 hingga umur 24 tahun, bahkan anak-nak pun yang berusia dari umur 5 hingga 9 tahun menggunakan internet sampai dengan 25,2 % dari total 171,17 juta jiwa. Hal ini menunjukkan peran media sosial, media masa, maupun hal lain yang menggunakan internet merupakan sarana dalam menaikkan popularitas dari segi demokrasi dan politik. Dampak buruknya dalam penggunaan media sosial menurut pendapat Mads P Sørensen (2018, hlm. 2). yaitu kurangnya interaksi sosial yang berada di masyarakat sehingga muncul istilah *clicktivism* atau aktivitas online yang setiap orang mau melakukan apa saja tanpa mengklik menggunakan jari tangan tanpa melakukan kegiatan secara langsung dengan masyarakat lainnya.

Selain peran media digital, menurut (Andi Rosdiati Razak, 2013,hlm.12) ia berpendapat peran serta masyarakat terutama generasi milenial yang sangat dibutuhkan sebagai upaya menumbuhkan sebuah pembangunan dalam mencapai kehidupan rakyat yang lebih baik, dan secara yuridis bahwa peran serta masyarakat merupakan kemitraan yang berada diantara *stakeholder* khususnya dalam lingkup pemerintahan yang ada, menjalain kerjasama yang baik dalam ruang public antara masyarakat, pemerintah dan pihak swasta merupakan sebuah konsep

pembangunan yang disebut dengan “*public private partnership*” akan tetapi faktanya masyarakat masih terabaikan dan belum terlibat secara penuh.

Peran media sosial sebagai sarana literasi politik generasi milenials pada proses pemilihan presiden 2019”. merupakan sebuah permasalahan dalam perpolitikan dan demokrasi saat ini, banyak hal yang harus digali seberapa besar pengaruh media sosial terhadap kehidupan masyarakat dalam menyikapi tahun politik dan pemilu serentak, khususnya dalam pemilihan presiden tahun 2019.

1.2 Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, bahwa yang menjadi masalah utama dalam penelitian ini mengenai bagaimana peran media sosial sebagai sebuah sarana literasi politik generasi milenial pada proses pemilihan presiden 2019 yaitu:

- 1) Bagaimana peran media sosial sebagai sarana literasi politik generasi milenials pada proses Pilpres tahun 2019 di Kabupaten Garut?
- 2) Bagaimana implikasi bentuk partisipasi generasi millenials Pada pelaksanaan proses pilpres tahun 2019 sebagai sarana literasi politik di Kabupaten Garut?
- 3) Apa yang menjadi hambatan generasi milenial terhadap pelaksanaan literasi politik pada proses pilpres 2019 melalui media sosial?
- 4) Apa upaya yang harus dilakukan generasi milenial dalam melaksanakan literasi politik pada proses pilpres 2019 melalui media sosial?

1.3 Tujuan penelitian

- 5) Tujuan umum, berdasarkan dari permasalahan yang telah diuraikan maka tujuan secara umum mengenai penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana peran media social Dalam mempengaruhi pandangan politik generasi milenial yang berada di Kabupaten Garut.
- 6) Tujuan khusus,
 - 1) Untuk mendeskripsikan bagaimana peran media sosial sebagai sarana literasi politik generasi pada proses pilpres 2019 di Kabupaten Garut.
 - 2) Untuk mendeskripsikan implikasi bentuk partisipasi generasi millenials terhadap proses pilpres 2019 sebagai sarana literasi politik di Kabupaten Garut

- 3) Untuk mendeskripsikan apa yang menjadi hambatan generasi milenial dalam melaksanakan literasi politik pada pilpres 2019 melalui media sosial.
- 4) Untuk mendeskripsikan upaya yang harus dilakukan generasi milenial dalam melaksanakan literasi politik melalui media sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian yang kami paparkan dengan gambaran penelitian yang akan dikaji, penulisan tesis ini juga diharapkan agar dapat bermanfaat dalam dunia Pendidikan diantaranya:

1) Secara Teoritis

Hasil dari pemikiran ini semoga dapat dijadikan sebagai sebuah referensi tersendiri dan sumber pembelajaran tambahan bagi para akademisi dalam mengembangkan pengetahuannya, untuk menganalisa sistem politik yang populer di kalangan milenial saat ini, terlepas dari kentalnya campur tangan teknologi dengan kehidupan masyarakat sehari-hari terutama pada generasi milenial, dan pemikiran ini semoga bermanfaat khususnya terhadap departemen PKN dan umumnya bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai peran media sosial sebagai sebuah sarana demokrasi dalam pemilihan presiden 2019. Adapun Manfaat dari media sosial adalah kecepatannya dalam memberikan dan memperoleh informasi kepada masyarakat.

2) Secara Praktis

5) Peneliti

- a. Untuk menambah sebuah pengetahuan dan tambahan pengalaman dalam dunia pendidikan bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan.
- b. Untuk menggali lagi lebih dalam apa yang ingin penulis cari dari sebuah pengetahuan lebih lanjut terhadap fenomena politik dan demokrasi pada proses pemilihan presiden 2019.
- c. Dan secara sadar ingin mengetahui lebih lanjut mengenai peran media sosial sebagai sebuah sarana literasi politik generasi milenial dalam proses pemilihan presiden 2019 sebagai upaya sarana demokrasi yang pokok.

6) Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, semoga dapat memberi sumbangan pengetahuan baru meski hanya sedikit apa yang kami dapat dari hasilnya nanti dan semoga bermanfaat dalam pengaplikasiannya dalam dunia Pendidikan dan dunia politik saat ini.

7) Akademisi

semoga dapat menjadi sebuah penghubung untuk menginsyafkan para pemain politik dalam mempraktekan demokrasi yang baik, sekaligus menerapkan nilai Pancasila untuk memperoleh norma hukum yang adil jujur dan transparan dan menjadikan media sosial sebagai sebuah informasi yang bersih dan netral.

8) Departemen Pendidikan Kewarganegaraan,

Hasil dari karya tulis ini diharapkan agar bisa menambahkan sedikit ilmu, mengenai peran dari media sosial sebagai sebuah sarana literasi politik pada proses pemilihan presiden 2019 pada generasi milenial.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Berdasarkan prosedur buku panduan penulisan karya tulis ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia

BAB I PENDAHULUAN: menjelaskan tentang gambaran permasalahan yang akan dibahas dan diteliti sehingga mahasiswa mampu untuk memfokuskan objek penelitian yang akan dikaji lebih mendalam. Dimana bab satu merupakan sebuah perkenalan yang berada dalam sebuah pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA (Peran Media Sosial Sebagai Sarana Demokrasi Bagi Generasi Milenial Dalam Pemilihan Presiden 2019). Kajian pustaka merupakan sebuah bagian kajian yang sangat penting karena didalamnya terdiri dari pemaparan teori, dalil, model dan rumusan penelitian serta sebuah konsep yang akan dibahas dalamnya, dan kajian teori dalam tesis lebih kepada analisis. Rancangan dan alur dalam melaksanakan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN (penelitian kualitatif dengan disain penelitian study kasus untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi secara umum). Dalam hal ini metode penelitian digunakan sebagai tehnik dalam

melakukan penelitian yang bersifat prosedural yang akan mengarahkan pembaca kepada alur dan tahapan bagaimana peneliti melakukan sebuah penelitian.

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN (Peran Media Sosial Sebagai Sarana Demokrasi Bagi Generasi Milenial Dalam Pemilihan Presiden 2019). Temuan penelitian ini memiliki dua hal utama *pertama* temuan hasil berdasarkan pengolahan dan analisis yang dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yang hasilnya beragam dengan berbagai jenis kemungkinan, *kedua* sebagai sebuah jawaban atas sebuah penelitain yang telah ditemukan sebelumnya.

BAB V SIMPULAN IMPLIKASI DAN REKOMENDASI: bab ini menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap analisis temuan dan mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan, entah itu berupa data data penting (dokumen atau surat menyurat, foto kegiatan dan lain sebagainya).